

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abel, R.L. 1995. *The Law and Society Reader*. New York : University Press
- Affandi, Nur Achmad. 2009. *APBD dan Prolema DPRD dalam Analisis APBD untuk Anggota DPRD Seri Penguatan Legislatif*. Jakarta : United States Agency for International Development USAID
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta : Kencana
- Asshidiqie, Jimmly. 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve
- Asshidiqie, Jimmly dan Ali Safa'at. 2012. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta : Konstitusi Press
- Aubert, Vilheml. 1986. *Dilemmas of Law in Welfare State*. European University Institute : Set. A Law
- Budiarjo, Miriam. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Chapra, M.Umer. 1999. *Islam and Economic Development*. Yogyakarta : Dana Bhakti Waqaf
- Christina, P.Parel et all. 1973. *Sampling Design and Procedures*. New York : ADC
- Cranston, Ross. 1985. *Legal Foundations of the Welfare State*. London : Weldenfeld and Nicolson
- Darmadji, Tjiptono. 2001. *Restrukturisasi : Memulihkan dan Mengakselerasi Ekonomi Nasional*. Jakarta : Grasindo

- Fauzan, Uzair. 2002. *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya (The Open Society and It's Enemy)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Gaffar. 2000. *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka
- Glasser, Matthew D. 1998. *Formulation of A Regulatory Framework for Municipal Borrowing in South Africa*. United State of America: RTI
- Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfi. 2009. *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*. Malang : Alumni
- Hartono, Sunaryati. 1988. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Cetakan Kedua Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman. Jakarta : Bina Cipta
- Hasan, Ali. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta : PT. Balai Pustaka
- J.Satrio. 2001. *Hukum, Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung : Cira Aditya Bakti
- Kin, Yun Hwan. 2003. *Local Government Finance and Bond Market. Phillippines* : Asian Developmen Bank
- Koswara, W. 2001. *Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*, Jakarta : Yayasan Pariba
- Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim. 1998. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1976. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung : LPHK Fakultas Hukum Universitas Padjajaran

- Teubnei, Gunther. 1986. *Dilemma of Law in Welfare State*. Berlin-New York : Walter de Gruyter
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Mahfud, Moh.MD. 2000. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Mansyur, Ali. 2010. *Pranata Hukum dan Penegakannya di Indonesia*. Semarang : Universitas Islam Sultan Agung
- Menski, Werner. 2006. *Comparative Law in a Global Context, The Legal Systems of Asia and Africa, Second Edition*. United Kingdom : Cambridge University Press
- Mishra, Ramesh. 1984. *Welfare State in Crisis Social Thought and Social Change*. London : Wheasheat Books Ltd Harvester Press
- Moleong, Lexi J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Muttaqien, Raisul. 2013. *Hukum Progresif*. Bandung : Nusa Media
- Nasarudin, M.Irsan, dkk. 2014. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group
- Nonet, Phillipe and Philip Selznick. 1978. *Law and Society in Transition : Toward Responsive Law*. Harper and Raw
- Nugraha, Safri. 2004. *Privatisation of State Enterprises in The 20<sup>th</sup> Century A Step Forwards or Backwards*. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Parsons, Wayne. 2006. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*. Jakarta : Kencana

- Praja, H.Juhaya S. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Purnomo, Budi. S. 2009. *Obligasi Daerah: Alternatif Investasi bagi Masyarakat dan Sumber Pendanaan Bagi Pemerintah Daerah*. Bandung : Penerbit Alfabeta
- Rahardjo, Sapto. 2004. *Panduan Investasi Obligasi*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Rahardjo, Satjipto. 1979. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung : Angkasa
- R.Dye. Thomas. 1960. *Understanding Public Policy*. Third Edition Prentice Hall Inc Englewood Cliffs N.J. 0732
- Rintuh, Cornelius. 1995. *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta : Liberty
- Salim, Agus. 2002. *Teori dan Paradigma Sosial, dari Denzin Guba dan Penerapannya*. Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya
- Santoso, Tri Wibowo. 2005. *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*. Jakarta : Kencana
- Sarwiji, Suwandi. 2008. *Semantik Pengantar Kajian Makna*. Yogyakarta : Media Perkasa
- Shidarta. 2006. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks ke-Indonesiaan*. Jakarta: Utomo
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo
- Sugiyono. 2014. *Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Alfabeta
- Suhandi, Gunarto. 2002. *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta : Universitas Atmajaya

- Sukirno, Sadono. 1982. *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah, dan Dasar Kebijaksanaan*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Kencana
- Swasono, Sri Edi. 1987. *Koperasi di dalam Orde Ekonomi Indonesia*. Jakarta : UI Press
- Syahputra, Imam dan Amin Widjaja. 2002. *Membangun Good Corporate Governance (GCG)*. Jakarta : Harvarindo
- Tamanaha, Brian Z. 1997. *Realistic Socio Legal Theory: Pragmatism and A Social Theory of Law*. Oxford : Clarendon Press
- Tanya, Bernard L, dkk. 2010. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta : Genta Publishing
- Teubnei, Gunther. 1986. *Legal Subjectivity as a Precondition Far the Interwinement of Las and the Welfare State*. Berlin-New York : Walter de Gruyter
- Thoha, Miftah. 1991. *Perspektif Perilaku Birokrasi*. Jakarta : Rajawali Press
- Warassih, Esmi. 2011. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- . 2015. *Penelitian Hukum Interdisipliner Sebuah Jalan Menuju Socio-Legal*. Yogyakarta : Thafa Media
- Wignjosoebroto, Soetandyo.2000. *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta : HUMA

## **Jurnal**

Asshiddiqie, Jimmly. 2003. *Struktur Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*. Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII di Denpasar, 14-18 Juli 2003.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2007, *Panduan Penerbitan Obligasi Daerah*

Dyah Setyaningrum, Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Peringkat Surat Utang Perusahaan di Indonesia, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Juli-Desember 2005 Volume 2 Nomor 2

Harun, Mukaramah dkk. *Introducing Municipal Bond Markets in Malaysia : An Assesment of Present Market Characteristic*. Malaysian Management Journal 7 January 2003

[Itsniawan, Abdul Munief dan Sri Saranta. \*Audit Report Lag pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia\*. Disampaikan pada Seminar Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi \(SNEMA\) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Jurnal ISBN : 978-602-17129-5-5 Tahun 2015](#)

Kumoroto, Wahyudi. *Pendapatan Asli Daerah Darah dan Pembiayaan Pembangunan*. Makalah disampaikan pda Forum Diskusi DPRD Kabupaten Kebumen di Hotel Jayakarta, DIY pada 25 November 2011

Mustafa, Delly. *Potret Pelayanan Perizinan pada Era Otonomi Daerah*, Jurnal Kebijakan Publik Volume 3 Nomor 1, Maret 2012 Universitas Veteran Makassar

Okta, Dewi, dan David Kaluge. *Analisis Peluang Penerbitan Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Daerah*. Journal of Indonesian Applied Economic Vol.5 No.2 Oktober 2011

[Richard, Seymour and Turner Sarah. 2002.](#) *Otonomi Daerah : Percobaan Desentralisasi Indonesi*. (New Zealand Journal of Asian Studies 4)

Sugiantari, Anak Agung Putu. *Peranan Pusat dalam Penerbitan Obligasi Daerah*. Jurnal Ganec Swara Volume 4 Nomor 2 September 2010

Soleman, Mochdar dan Mohammad Noer. *Nawacita Sebagai Strategi Khusus Jokowi Periode Oktober 2014-20 Oktober 2015*, Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan Volume 13 Nomor 1 Tahun 2017

### **Penelitian**

Amnan, Achmad. 2016. *Analisis Penerbitan Obligasi Daerah (Studi Kasus Rencana Penerbitan Obligasi Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat)*. Universitas Gadjah Mada: Thesis

Chandra, Anthony Pratama. 2011. *Aspek Hukum Obligasi Daerah di Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta*. Universitas Indonesia : Thesis

Darien Aldiano. 2015. *Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Obligasi Daerah atas Tidak Terpenuhinya Kewajiban Pembayaran oleh Pemerintah Daerah*. Jurnal Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Fredholm, Johan and Benjamin Taghavi-Awal. 2006. *Capital Markets in Developing Countries- A Model for Capital Market Diagnostics with A Field Study Implementation in Georgia*. School of Business Stockholm University:Thesis

Habililah, Muhammad. 2011. *Analisis Obligasi Daerah (Municipal Bond) Sebagai Alternatif Pembiayaan Daerah dan Strategi Dalam*

*Menerbitkannya (Studi Kasus Pemerintah Provinsi Jawa Timur.*  
Universitas Brawijaya : Skripsi

Ilham, Hendrico. 1999. *Municipal Bond Alternatif Pendanaan Jangka Panjang.* Universitas Indonesia : Tesis

Institute for Economics and Peace. 2015. *Global Peace Index 2015 :Measuring Peace, Its Causes and Its Economic Values.* Sydney

Paksi, Tutut Ferdiana Mahita. 2017. *Rekonstruksi Kebijakan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang Berbasis Sustainable Development.* Universitas Diponegoro : Skripsi

#### **Artikel Internet**

Ahmad Rofik. Seri Pembelajaran PATTIRO : Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia diakses melalui [pattiro.org/2014/12/seri-pembelajaran-pattiro-keterbukaan-informasi-publik-di-indonesia](http://pattiro.org/2014/12/seri-pembelajaran-pattiro-keterbukaan-informasi-publik-di-indonesia)

Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah Jawa Barat, Pemprov Jabar Raih Opini WTP Enam Kali, diakses melalui <http://bappeda.jabarprov.go.id/pemprov-jabar-raih-opini-wtp-keenam-kali/> pada 10 April 2018

Badan Pembinaan Hukum Nasional. Naskah akademik RUU tentang Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah diakses melalui [http://www.bphn.go.id/data/documents/naskah\\_akademik\\_ruu\\_tentang\\_hubungan\\_kewenangan\\_pemerintah\\_pusat\\_dan\\_daerah.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_tentang_hubungan_kewenangan_pemerintah_pusat_dan_daerah.pdf)

Bank Indonesia Dorong Pemda terbitkan Obligasi Daerah diakses di [www.tempo.co](http://www.tempo.co). 24 November 2016 pada 10 Januari

Chandra, Ardan Adhi. *Dari 533 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Hanya 312 Raih Opini WTP.* Diakses melalui <https://finance.detik.com/berita-ekonomi->



[bisnis/3313189/dari-533-laporan-keuangan-pemerintah-daerah-hanya-312-raih-opini-wtp](http://bisnis/3313189/dari-533-laporan-keuangan-pemerintah-daerah-hanya-312-raih-opini-wtp)

Dharma, dkk. *Implikasi Penerapan Kebijakan Otonomi Daerah terhadap Hubungan Eksekutif dan Legislatif Daerah (Studi Proses Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Kepala Daerah di Provinsi Jawa Barat)*. Diakses melalui <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=146144&val=2264&title=HUBUNGAN%20PEMERINTAH%20DAERAH-DPRD%20DALAM%20PEMBAHASAN%20RANPERDA>

Doi Tokero, dan Tooko Hayashi. *Toward Reform of Local Bond System in Japan*. Economic and Social Research diakses melalui [www.esri.go.jp/jp/workshop/050914/050914Doi\\_Hayashi-1.pdf](http://www.esri.go.jp/jp/workshop/050914/050914Doi_Hayashi-1.pdf)

Hariyanto, Ibnu. *ICW : Dalam 6 Bulan, 226 Kasus Korupsi Rugikan Negara Rp 1,83 T*, diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-3621894/icw-dalam-6-bulan-226-kasus-korupsi-rugikan-negara-rp-183-t>

Humas Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Dirjen Perimbangan Keuangan : Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa lebih besar daripada Belanja Kementerian/Lembaga*, diakses melalui <http://www.djpk.depkeu.go.id/?p=4204>

I Made B. Tirthahaya, *Good Corporate Governance dan Peraturan Pasar Modal* dalam Warta Bapepam dan LK Edisi Maret 2012 diakses melalui <http://made-tirthayatra.blogspot.co.id/2012/07/good-corporate-governance-dan-peraturan.html> pada 02 Mei 2018 pukul 19.00 WIB

International Transparency. *Transparency International Corruption Perceptions Index 2016*, diakses melalui [www.transparency.org/cpl](http://www.transparency.org/cpl)

- Iwan Jaya Aziz. *Ini Penyebab Pemda Sulit Terbitkan Obligasi*, diakses melalui <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt532acf6514bf2/ini-penyebab-pemda-sulit-terbitkan-obligasi> Kamis, 20 Maret 2014
- Kerja Nyata, 2 Tahun Kerja Nyata-Jokowi-JK*, diakses melalui <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/KSP%202%20Tahun%20Jokowi%20JK.pdf>
- Laporan Keuangan Ganjal Obligasi Daerah diakses melalui <https://megapolitan.kompas.com/read/2008/10/15/19094265/laporan.keuangan.ganjal.obligasi.daerah.dki.pada.10.april.2018>
- Madya, Widyaiswara. 2007. *Kenapa Obligasi Daerah Menarik untuk Diterbitkan?* Artikel pada Perimbangan Keuangan dalam Pusat Pendidikan dan Pelatihan KNPK
- Nasarudin, M.Irsan. 2001. *Risiko Investasi pada Surat Berharga Pasar Modal*. Diakses melalui [jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1414/1334](http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1414/1334)
- Narendra, Nando. 2015. *Mengupas Kesulitan Penerbitan Obligasi Daerah*. Diakses melalui [www.hukumonline.com/berita/mengupas-kesulitan-penerbitan-obligasi-daerah](http://www.hukumonline.com/berita/mengupas-kesulitan-penerbitan-obligasi-daerah) diterbitkan pada Minggu, 22 November 2015
- Pefindo Baru Pemprov Jabar yang Serious Terbitkan Obligasi Daerah diakses melalui <http://republika.co.id/berita/ekonomi/makro/14/12/04/ng28sr-pefindo-baru-pemprov-jabar-yang-serius-terbitkan-obligasi> pada 10 April 2018
- Pemerintah DKI Jakarta. 2010 dalam paparan Perkembangan Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah pada Maret. 2010 diakses melalui [http://www.pppindonesia.co.id/Content/Presentation\\_on\\_M](http://www.pppindonesia.co.id/Content/Presentation_on_M)

[unicipa %20Bond for DKI-Bahasa Indonesia \(AO 060410\)-update rev 090410 p SB.pdf](#)

[Pemprov Jabar Tunda Penerbitan Obligasi Daerah diakses melalui <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/17/09/18/owguex382-pemprov-jabar-tunda-penerbitan-obligasi-daerah> pada 10 April 2018](#)

[Penerbitan Obligasi untuk Proyek Infrastruktur di Jakarta Batal diakses melalui \[www.ibpa.co.id/News/ArsipBerita/tabid/126/EntryId/4851/Penerbitan-Obligasi-untuk-Proyek-Infrastruktur-di-Jakarta-Batal.aspx\]\(http://www.ibpa.co.id/News/ArsipBerita/tabid/126/EntryId/4851/Penerbitan-Obligasi-untuk-Proyek-Infrastruktur-di-Jakarta-Batal.aspx\) pada 10 April 2018](#)

Polycarpus, Rudy. *Pemerintah Daerah Jadi Episentrum Kasus Korupsi*, diakses melalui <http://mediaindonesia.com/news/read/63966/pemerintah-daerah-jadi-episentrum-kasus-korupsi/2016-08-29>

Pratiwi, Ratih Nur. *Politisasi Anggaran Sektor Publik*. Jurnal Universitas Brawijaya diakses melalui [interaktif.ub.ac.id/index.php/interaktif/article/download/114/108](http://interaktif.ub.ac.id/index.php/interaktif/article/download/114/108)

Putra, I Made Dharma Sugama. *Peran BPK dalam Melaksanakan Pemeriksaan atas Pengelolaan Obligasi Daerah*. Diakses melalui <http://manado.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/03/2.-Obligasi-Daerah-Pwk-Sulut-Tulisan-Hukum-edit-1.pdf>

*Ringkasan Tinjauan Regulasi dan Kelembagaan Penerbitan Obligasi Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur di Daerah*, diakses melalui <https://www.bappenas.go.id/files/pendanaan/kajian/kajian-2014-pendanaan-obligasi-daerah.pdf>

[Rohmawati, Ayu Nur. \*Menilik Keputusan Berani Pemprov Jabar Terbitkan Obligasi untuk Biaya Infrastruktur\*. Diakses](#)

[https://www.kompasiana.com/ayurahma/menilik-keputusan-berani-pemprov-jabar-terbitkan-obligasi-untuk-biaya-infrastruktur\\_56836f82d37a61261283ec25](https://www.kompasiana.com/ayurahma/menilik-keputusan-berani-pemprov-jabar-terbitkan-obligasi-untuk-biaya-infrastruktur_56836f82d37a61261283ec25) tanggal 30 Desember 2015

Safa'at, Ali. *Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, dan John Rawls)*. <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/keadilan.pdf> tanggal 08 September 2017

Suharto, Edi *Kebijakan Sosial*, makalah disampaikan pada Diklat Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Tingkat ahli, Jenjang Madya BBPPKS Lembang 14 November 2006

Sukmana, Yoga. *Pemda Enggan Terbitkan Obligasi Daerah, Kenapa?*  
Diakses  
melalui <http://ekonomi.kompas.com/read/2016/11/24/233649526/pemda.enggan.terbitkan.obligasi.daerah.kenapa> dipublis tanggal 24 November 2016

Sulistyo, Budi. *Pasang Surut (Rencana) Penerbitan Obligasi Daerah*, Artikel pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Suseno, Jarot Jati Bagus. 2014. *Membedah Tembok Pembatas Potisivisme di Jalan Penelitian Hukum*.

Tim Studi Penyusunan Draft Peraturan Mengenai Pedoman Penerbitan Obligasi Daerah. 2005. *Studi Peraturan Mengenai Pedoman Penerbitan Obligasi Daerah*. Jakarta : Departemen Keuangan RI

Tren Data Realisasi Dana APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010-2016  
diakses melalui Diakses  
melalui <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/visual/#/tabel>

Tren Data Realisasi Dana APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2016  
diakses melalui Diakses  
melalui <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/visual/#/tabel>

Wakhid, Ali Abdul. *Eksistensi Konsep Birokrasi Max Weber dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia*, Jurnal RAPIs Volume 7 Nomor 13 Juli-Desember 2011

Yustik, Ahmad Yustik. *Permasalahan Umum dan Klasik dalam Penyusunan APBD*, diakses melalui  
<https://felanzifa.wordpress.com/2017/10/07/permasalahan-umum-dan-klasik-dalam-penyusunan-apbd/>

### **Kamus**

A.Garner. 1990. *Black's Law Dictionary Seventh edlflon*. St.Paul Minn : West Group

Pusat Bahasa. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta : Balai Pustaka